

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut.

1. Prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Pasaman Barat kepada DPRD di kabupaten Pasaman tahun 2022

Proses pembentukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, finalisasi, penyampaian, pembahasan, hingga tindak lanjut. Tim penyusun LKPJ dibentuk, yang terdiri dari perwakilan berbagai OPD terkait dan dipimpin oleh sekretaris daerah. Tim kemudian mengumpulkan data dan informasi terkait capaian kinerja dan realisasi anggaran dari seluruh OPD. Tim penyusun LKPJ menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan, kemudian menyusun LKPJ berdasarkan format dan struktur yang telah ditetapkan. Data dan informasi dalam LKPJ diperiksa dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya. LKPJ kemudian direviu secara internal oleh tim LKPJ dan pimpinan organisasi untuk memastikan kualitas dan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil reviu internal, LKPJ diperbaiki dan disempurnakan Oleh bupati, kemudian memberikan persetujuan terhadap LKPJ yang telah final. Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban yang sudah bersifat final tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD. Kemudian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut dibahas oleh DPRD untuk diberikan masukan dan saran. Tindak lanjut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut menjadi masukan bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun berikutnya. Hal ini diatur dalam Undang - Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bupati Kabupaten Pasaman Barat dalam laporan pertanggungjawaban Pemerintah di Kabupaten Pasaman Barat ke DPRD.

- 1) Kesalahan yang Berulang dalam pengisian format LKPJ.
- 2) Adanya Pergantian Kepala Bagian yaitu dari Kepala Bagian lama kepada Kepala Bagian yang barudan Kurangnya Pemahaman akan LKPJ.
- 3) Keterlambatan Data yaitu Data yang akan dilaporkan dalam LKPJ seringkali belum siap pada saat proses penyusunan LKPJ dimulai.
- 4) Kualitas Data yang Kurang Baik yaitu data yang diserahkan oleh SKPD terkadang tidak lengkap, tidak akurat, dan tidak konsisten.

Hal ini disebabkan oleh:

- A. Kurangnya kontrol dan pengawasan dari BPKAD.
- B. Sistem pencatatan keuangan yang belum memadai.
- C. Kurangnya pelatihan bagi staf SKPD dalam mengelola keuangan daerah.

- 5) Sistem Informasi yang Belum Memadai. Sistem informasi keuangan daerah yang belum memadai untuk mendukung proses penyusunan LKPJ. Ini menyebabkan sulit dalam mengolah dan menganalisis data dan keterlambatan dalam penyusunan LKPJ.

Keadaan tersebut berdampak terhadap proses penyusunan proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Kepada DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga Laporan yang disusun menjadi kurang maksimal sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana mestinya.

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan Bupati untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yandra yang menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 31 Januari 2024. Dalam tahapan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan bupati guna mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam proses penyusunan. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain

- 1) Surat Peringatan dari Pimpinan. Surat peringatan merupakan langkah tegas yang dapat diambil untuk mengatasi keterlambatan pelaporan data.
- 2) Memberikan Pemahaman untuk Kepala Bagian Baru.
- 3) Membuat Timeline yang Jelas. Timeline yang jelas merupakan alat penting untuk memastikan penyusunan LKPJ tepat waktu.

- 4) Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Antar OPD.
- 5) Meningkatkan Kinerja Pemerintah.
- 6) Meningkatkan kepercayaan publik

Dengan beberapa upaya seperti yang penulis buat diatas,diharapkan akan dapat mencegah atau mengurangi Kendala-kendala yang dihadapi oleh dalam proses menyusun laporan pertanggungjawaban Pemerintah di Kabupaten Pasaman Barat ke DPRD.

B. Saran

Berdasarkan rangkuman hasil penelitian tentang proses penyusunan LKPJ, berikut beberapa saran untuk mengatasi kendala yang dihadapi:

1. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi:.

A. Melakukan rapat koordinasi secara berkala: Rapat ini dihadiri oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan LKPJ untuk membahas kemajuan dan kendala yang dihadapi.

B. Membuat platform online untuk berbagi informasi: Platform ini dapat digunakan untuk berbagi data, dokumen, dan informasi terkait LKPJ.

2. Memperkuat Kapasitas SDM:

A. Melakukan pelatihan bagi staf yang terlibat dalam penyusunan LKPJ: Pelatihan ini dapat memberikan

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menyusun LKPJ yang berkualitas.

- B. Membuat pedoman penyusunan LKPJ yang jelas dan mudah dipahami: Pedoman ini dapat membantu staf dalam memahami prosedur dan format penyusunan LKPJ.

3. Memperbaiki Sistem dan Prosedur:

- A. Membuat timeline yang jelas untuk penyusunan LKPJ: Timeline ini dapat membantu staf dalam menyelesaikan tugasnya tepat waktu.
- B. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses penyusunan LKPJ: Contohnya, menggunakan aplikasi untuk mengolah data dan membuat laporan.
- C. Membuat sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan kualitas LKPJ: Sistem ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan dalam proses penyusunan LKPJ.

4. Meningkatkan Sinergi dengan BPS:

- A. Melakukan koordinasi dengan BPS sejak awal proses penyusunan LKPJ: Hal ini dapat membantu dalam memastikan ketersediaan data yang dibutuhkan.
- B. Membuat kesepakatan bersama terkait jadwal penyampaian data: Kesepakatan ini dapat membantu dalam memastikan data yang diterima tepat waktu.

C. Melakukan pelatihan bagi staf BPS dan staf pemerintah daerah terkait pengolahan data: Pelatihan ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas data yang digunakan untuk penyusunan LKPJ.

5. Meningkatkan Sanksi dan Reward:

A. Memberikan sanksi kepada pihak yang terlambat atau tidak menyerahkan data: Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji, atau bahkan pencopotan jabatan.

B. Memberikan reward kepada pihak yang menyelesaikan tugasnya dengan baik: Reward ini dapat berupa bonus, penghargaan, atau promosi jabatan.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan proses penyusunan LKPJ dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan LKPJ yang berkualitas dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Hukum Tata Negara Indonesia*. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta..
- Mardiasmo .2023. *APBD: Teori dan Praktik*. Edisi 10. Andi. Yogyakarta.
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum* LPPM Universitas Bung Hatta. Padang.
- Moenta, dkk.2017. *Dasar-Dasar Pemerintahan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Rahardjo Satjipto. 2003. *Hukum Progresif*. PT Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Swasono, Sri Edi.2023. *APBD: Konsep, Penyusunan, dan Analisisnya*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Swasono, Sri Edi.2023. *APBD: Konsep, Penyusunan, dan Analisisnya*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Utrecht, E. 1965. *Pengantar Hukum Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2023.

C. SUMBER LAIN

- Arsyad, A. (2022). Analisis Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Nagari) (Studi Kasus pada Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 10(1), 1-14.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020. <https://www.bpk.go.id/>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. <https://www.kemendagri.go.id/>
- Kompas.com. 2023. *Babak Baru Kasus Korupsi RSUD Pasaman Barat, Penyidik Limpahkan 4 Berkas Perkara Ke JPU*. <https://regional.kompas.com/read/2023/10/04/120735478/babak-baru-kasus-korupsi-rsud-pasaman-barat-penyidik-limpahkan-4-berkas>
- Marbun, M. 2012. *Fungsi DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2).
- Universitas Andalas. (2022). Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 11(2).